

**ANALISIS PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT KOTA JAMBI  
DALAM MENENTUKAN CALON GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2024**

**Oleh:  
Sutri Destemi Elsi, Dimas Rizal<sup>\*)</sup>**

Proram Studi Ilmu Politik Universitas Jambi, Indonesia

\*Email Korespondensi : [dimasrizal@unja.ac.id](mailto:dimasrizal@unja.ac.id)

**Abstract**

*General elections (elections) are a means of implementing popular sovereignty, where the people determine for themselves the choices they believe in. This means that the people have full power to determine their leaders, because the people hold the highest power. Jambi Province is a socially plural region, there are several tribes in Jambi province including 44% of Jambi origin tribes, 29% of Javanese, followed by 5% Malays, 5% Minangkabau, 4% Batak, 3% Banjar. , Bugis 3%, Sundanese 3%, Tribes from South Sumatra 3%, Chinese 1%, and Others 1%. The approach taken in this research used a qualitative descriptive approach with purposive sampling techniques with interview techniques with direct informant sources. From the results of the research, voter behavior in Jambi City from an organizational and youth perspective can be taken broadly. The behavior of the people of Jambi City can be categorized as rational and critical voter behavior. This is supported by data that shows the demands and expectations they want from the candidates who will run in the 2024 election for governor of Jambi Province. The vision and mission and work programs they offer to the community will be the main factors for the people of Jambi city in making their choice. Political parties in the results of this research do not have a large role in determining society's choices.*

**Key Words :** *Political Parties; Voter Behavior; General Election*

**Abstrak**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang plural secara sosial, terdapat beberapa suku yang ada di provinsi jambi di antaranya suku asal jambi 44%, jawa 29%, dan di ikuti suku melayu 5%, Minangkabau 5%, batak 4%, banjar 3%, Bugis 3%, Sunda 3%, Suku asal Sumsel 3%, Cina 1%, dan Lainnya 1%. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dengan teknik wawancara dengan sumber informan langsung. Dari hasil penelitian, perilaku pemilih yang ada di Kota Jambi dari sudut pandang organisasi dan kepemudaan dapat di ambil secara garis besar perilaku masyarakat Kota Jambi dapat dikategorikan perilaku pemilih yang rasional dan kritis. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bagaimana tuntutan dan harapan yang mereka inginkan dari kandidat yang nantinya akan maju pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2024. Visi misi serta program kerja yang mereka tawarkan kepada masyarakat akan menjadi faktor utama bagi masyarakat kota jambi dalam menentukan pilihan. Partai politik dalam hasil penelitian ini tidak mendapatkan andil yang besar dalam masyarakat menentukan pilihannya.

**Kata Kunci :** *Partai Politik; Perilaku Pemilih; Pemilihan Umum.*

### **A. Pendahuluan**

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu yang diadakan di kebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap menceminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus dijalankan dengan baik oleh setiap warga negara, dengan demikian konsep demokrasi dapat terwujud dengan baik.

Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat melainkan untuk memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan politik. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat memiliki wadah untuk menentukan pemimpinnya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan aspirasi yang mana masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam konteks memilih, yang dikatakan pemilih adalah pihak yang menjadi tujuan dari aktor politik

dalam berkontestasi untuk dipengaruhi dan mereka yakinkan supaya dapat menerima serta mendukung kandidat tersebut dan memberikan hak pilihnya kepada aktor yang ikut pada pemilihan pemimpin tersebut. Selanjutnya perilaku politik merupakan tindakan seseorang secara individual atau secara kelompok dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Salah satu bentuk dari perilaku politik adalah ketika masyarakat memilih calon pemimpin pada saat dilaksanakannya pemilihan umum.

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024. Praktis satu tahun lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih muda dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi

penyumbang “golput” dalam pemilu 2024.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang plural secara sosial, terdapat beberapa suku yang ada di provinsi jambi di antaranya suku asal jambi 44%, jawa 29%, dan di ikuti suku melayu 5%, Minangkabau 5%, batak 4%, banjar 3%, Bugis 3%, Sunda 3%, Suku asal Sumsel 3%, Cina 1%, dan Lainnya 1%. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi jambi memiliki keberagaman suku yang harus dijaga agar tetap harmonis ditengah kontestasi politik yang biasanya menggunakan simbol identitas kesukuan tertentu. Dalam keberagaman suku yang ada di Provinsi Jambi maka akan lahir perilaku politik yang berbeda-beda antar daerah dikarenakan keberagaman tersebut. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk menganalisis perilaku politik masyarakat Kota Jambi pada pemilihan gubernur tahun 2024.

Dalam penelitian ini Kota Jambi akan di jadikan sebagai subjek penelitian dikarenakan keberagaman suku, budaya, agama di masyarakat Kota Jambi yang heterogen sehingga dapat menggambarkan masyarakat Provinsi Jambi secara keseluruhan. Tema ini akan mencoba menganalisis perilaku pemilih pada pada masyarakat kota jambi dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2024 mendatang. Temuan yang penulis targetkan pada penelitian ini adalah melihat perilaku pemilih di Kota Jambi pada pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2024. Adapun rumusan masalah yang akan di angkat pada penelitian ini. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat Kota Jambi

dalam menentukan calon gubernur tahun 2024?. Kota jambi sebagai daerah plural secara sosial di Provinsi Jambi, dapat mewakili masyarakat Provinsi Jambi secara keseluruhan dengan masyarakat yang heterogen. Dalam penelitian ini tema yang di angkat adalah perilaku pemilih masyarakat dalam menentukan calon gubernur tahun 2024. Ini akan menjadi referensi bagi partai politik yang nantinya akan menentukan calon gubernur tahun 2024. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam membangun provinsi jambi dari insan akademi Universitas Jambi.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dengan teknik wawancara dengan sumber informan langsung. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. serta data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti dokumen serta situs web yang memuat data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Kota Jambi. Dimana objek penelitian adalah masyarakat Kota Jambi. Dari data yang peneliti sampaikan pada latar belakang diharapkan dapat menganalisis perilaku politik masyarakat yang ada di Kota Jambi dalam menentukan calon Gubernur Provinsi Jambi tahun 2024.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Perilaku Pemilih Masyarakat Jambi terhadap Calon Gubernur Jambi 2024

Provinsi Jambi akan melakukan pemilihan gubernur pada Tahun 2024. Kota Jambi sebagai basis massa yang netral dikarenakan di Kota Jambi masyarakatnya Heterogen dikarenakan campuran suku yang ada di Kota Jambi. Dalam perilaku pemilih kita dapat membedakan perilaku masyarakat menjadi Pemilih Rasional, Pemilih Kritis, Pemilih Tradisional dan Pemilih Skeptis. Perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kandidat itu sendiri serta partai politik yang mengusungnya.

Dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan gubernur dijelaskan bahwa calon gubernur harus memenuhi ambang batas parliamentary threshold untuk gubernur harus memenuhi 20% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Sehingga seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon gubernur harus mendapatkan dukungan dari partai politik yang setidaknya satu atau gabungan dari beberapa partai politik yang jumlah kursi parlemennya jika dijumlahkan minimal 20%.

Hal ini menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi kandidat dan juga partai koalisi dalam menyatukan persepsi dan kandidat yang akan dicalonkan. Tidak berhenti disitu, setelah mendapatkan perahu dalam berkontestasi partai ataupun kandidat akan dihadapkan dengan tuntutan dari masyarakat dalam mendapatkan simpati dan dukungan dalam proses

pencalonan nantinya. Perilaku politik masyarakat juga akan menjadi faktor penentu dari visi misi kandidat pada pemilihan gubernur. Kalangan masyarakat mempunyai keinginan dan tuntutan yang berbeda-beda kepada semua calon, tergantung bagaimana calon gubernur nantinya membuat keinginan dan harapan masyarakat tersebut bisa dimasukkan kedalam program kerja yang nantinya di tawarkan kepada masyarakat.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan tokoh pemuda muhammadiyah, yang pertama E (30), mengatakan:

*“Pemuda Muhammadiyah Jambi berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang sejuk, jujur dan damai. Maka kami menginginkan calon pemimpin yang bisa mendengar suara rakyat bukan suara golongan tertentu dalam mengambil kebijakan untuk semua aspek. Kami berharap dalam pengambilan keputusan semua elemen nantinya akan dilibatkan. Hal ini biasanya akan tergambar nantinya pada isaat kampanye bagaimana visi misinya serta gestur yang dikeluarkan oleh calon gubernur”.*

Berdasarkan *stetment* yang dikeluarkan ini pemuda muhammadiyah Kota Jambi mengarah kepada perilaku pemilih yang rasional dengan mengedepankan orientasi pada policy problem solving. Hal ini aka menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi calon Gubernur Provinsi Jambi yang nantinya akan bersaing untuk

meyakinkan orientasi pemilih merancang Visi misinya lima tahun kedepan khususnya di Kota Jambi. Calon gubernur harus bisa meyakinkan pemilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan mengedepankan asas keterbukaan dalam pengambilan kebijakan. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh tokoh muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama S (55) Kota Jambi, ia mengatakan :

*“Pemimpin Jambi harus melakukan langkah nyata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Jambi serta Provinsi Jambi pada umumnya. memacu program-program pembangunan beberapa infrastruktur, pendidikan, pertanian, maupun program lain demi kepentingan masyarakat”.*

Harapan dari tokoh NU Kota Jambi berfokus pada harapan mendapatkan pemimpin yang bisa membangun Jambi dari pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya. Visi calon gubernur nantinya yang akan mendapatkan dukungan dari tokoh NU Kota Jambi adalah yang beririsan dengan harapan dari harapan NU itu sendiri. Basis massa NU ini akan menjadi rebutan dari semua calon baik eksekutif maupun legislatif dikarenakan massa organisasi ini sangat besar. Disini kita bisa melihat perilaku pemilih dari organisasi NU di Kota Jambi perilaku pemilih yang rasional dikarenakan melihat dari program-program yang nantinya akan

ditawarkan kepada masyarakat. Tokoh Pemuda Kota Jambi R (29) punya pandangan tersendiri untuk pilihan calon gubernur 2024, dia mengatakan :

*“Pemimpin itu harus bisa membuka dan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, terutama pada golongan muda dan produktif seperti kami. Pemimpin harus bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di provinsi Jambi untuk membuat lapangan kerja. Bukan sekedar janji tapi harus jelas apa yang akan diperbuat untuk jambi 5 tahun kedepan. Kalau hanya sekedar janji-janji semua orang juga bisa, tapi harus ada program kebijakan yang direncanakan untuk membuka lapangan pekerjaan”.*

Tokoh pemuda lebih kritis dalam menentukan pilihan calon yang nantinya akan bertarung pada tahun 2024 mendatang. Mereka menginginkan calon pemimpin yang punya program membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang produktif. Mereka tidak berbicara tentang dari partai mana mereka berasal, yang penting membuat program kebijakan untuk membuka lapangan kerja. Tantangan ini harus dijawab oleh calon gubernur tahun 2024 untuk mendapatkan simpati dari pemuda yang ada di Kota Jambi.

Dari hasil wawancara dari tiga tokoh organisasi di kota jambi, tidak ada yang membicarakan tentang partai politik. Tetapi mereka lebih menekankan tentang ketokohan dan program yang nantinya yang

aakan ditawarkan kepada masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya dan masyarakat Kota Jambi pada khususnya. Dalam negara demokrasi partai itu seharusnya mempunyai ideologi yang kuat sehingga masyarakat dalam menentukan pilihan bukan berdasarkan atas individu tetapi berdasarkan atas pertimbangan dari partai mana kandidat itu berasal. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai yang ada di provinsi jambi dan juga partai yang ada di Indonesia. Mereka harus bisa bangkit untuk mengubah mindset ditengah masyarakat kandidat lebih besar dibandingkan dengan partai politik itu sendiri.

#### **Perilaku Pemilih**

Perilaku memilih (*voting behavior*) adalah proses penentuan keputusan seseorang untuk memilih (atau tidak memilih) partai atau kandidat tertentu dalam sebuah pemilihan umum. Menurut Evans, perilaku memilih dapat dilihat dari dua level analisis yang berbeda, yakni level mikro (individu) dan level makro (masyarakat). Studi tentang perilaku pemilih di tingkat mikro yang dilakukan secara agregat dapat menghasilkan data agregat di tingkat regional atau nasional (Evans, Jocelyn A J. 2004).

Istilah pemilihan atau pemberian suara (*voting*) sebenarnya sudah dikenal dalam terminologi Ilmu Politik sejak lama. Mulai dari Filsuf Aristoteles sampai pada filsuf De Tocqueville mencantumkan istilah *voting* dalam karya-karya mereka. Namun demikian, studi tentang perilaku memilih secara lebih khusus dan fokus baru dilakukan pada awal abad ke-20. Salah satu di antaranya adalah

Siegfried (1913) yang melakukan penelitian mengenai pola pemilihan (*voting patterns*) di Prancis bagian Barat sebelum Perang Dunia I. Woshinsky mengidentifikasi dua kelompok variabel yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih. Pertama adalah variabel objektif, seperti kelas, ras, agama, etnis, gender, tempat tinggal, kedaerahan, dan usia. Kedua adalah perspektif subjektif individu pemilih terhadap dirinya sendiri (Evans, Jocelyn A J. 2004: 21). Namun demikian, Woshinsky mengakui bahwa perilaku memilih adalah sesuatu yang kompleks. “Apa yang ada dalam benak pemilih adalah gabungan antara pengalaman hidup dan sebuah pemahaman mengenai pengalaman hidup, yang menentukan di hari pemilihan (Woshinsky, Oliver H. 2008: 132)”.

Dilihat berdasarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemilih, Heywood mengelompokkan perilaku pemilih ke dalam tiga model atau pendekatan, yakni: model sosiologis, model identifikasi partai dan model pilihan rasional (Heywood, Andrew. 2007: 266).

#### **Model Sosiologis**

Model Sosiologis ini dikembangkan berdasarkan penelitian di Erie County, Ohio, Amerika Serikat, pada awal tahun 1940-an. Paul Lazarsfeld dan kawankawan melakukan sedikitnya tujuh panel survei terhadap 600 responden, baik dengan pertanyaan yang sama maupun yang berbeda. Tujuan utama survei tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku pemilih selama kampanye pemilihan presiden (Bartels, Larry M. 2009). Karena

dilakukan oleh para peneliti dari Columbia University, maka model ini sering juga disebut Model Columbia. Kesimpulan utama penelitian mereka adalah bahwa perilaku memilih ditentukan latar belakang sosiologis seseorang. Latar belakang sosiologis yang dimaksud antara lain adalah umur, wilayah asal seseorang (misalnya: Jawa, Luar Jawa), tempat tinggal seseorang (misalnya: kota, desa), jenis kelamin, ras dan etnis, status pekerjaan, status sosial-ekonomi, dan orientasi keagamaan.

Model ini juga menyatakan bahwa proses kampanye dan pemberitaan media massa memiliki pengaruh yang kecil terhadap preferensi memilih seseorang, sebab pada saat kampanye dilakukan sebagian besar pemilih sudah memiliki keputusan mengenai kandidat atau partai yang akan mereka pilih. Publikasi awal model sosiologis dapat dilihat pada *The People's Choice* yang ditulis Lazarsfeld, Berelson, Gaudet (1944); serta *Voting* karya Berelson, Lazarsfeld, McPhee (1954).

### **Model Identifikasi Partai**

Model Identifikasi Kepartaian atau Model Sosial - Psikologis yang dikembangkan oleh Campbell, Converse, Miller, dan Stokes (1960) dari Michigan University. Menurut model ini, preferensi politik seseorang dalam pemilihan umum bukan hanya ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih, tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor psikologis. Campbell dan kawan-kawan memunculkan konsep identifikasi kepartaian (*party identification* atau *partisanship*) yakni rasa kedekatan dengan partai

politik tertentu. Konsep ini menjadi rujukan banyak peneliti yang mengkaji masalah perilaku pemilih sampai hari ini.

Selang beberapa tahun setelah penelitian di Erie County, para peneliti dari Michigan University, melakukan survei secara nasional menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1948. Survei tersebut pada awalnya dilakukan tidak secara khusus untuk mengetahui perilaku pemilih, melainkan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Namun, "*at the end of these interviews, in order to determine the degree of political interest of the respondents and their general political orientation, had asked respondents whether they planned to vote in the upcoming presidential election and for which party*" Pada bagian akhir wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketertarikan dan orientasi politik responden secara umum, kepada responden ditanyakan apakah mereka berencana akan memilih pada pemilu presiden yang akan datang dan memilih partai apa (Davidson, Donald, 2004: 8)".

Identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Sementara evaluasi terhadap kandidat melihat dilihat karena sejarah yang telah diukir atau masa lalu kandidat. Namun figur kandidat dianggap paling memiliki

ketertarikan dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih. Seperti yang diungkapkan seorang informan Deisy Montung (45 tahun, tim sukses salah satu calon). “Figur dari calon kepala daerah yang paling penting. Kota Jambi butuh pemimpin seperti kandidat yang saya pilih, seperti ingin berbagi dengan tulus pada masyarakat bahkan membantu dengan siapa saja termasuk orang yang tidak dikenal.” Lebih lanjut Deisy mengatakan, “Saya menyatakan mendukung beliau saat penetapan kandidat. Dibalik itu saya juga mengenal pribadinya secara baik, jauh sebelum terjun di dunia politik”.

#### **Model Pilihan Rasional**

Sementara itu, Model Pilihan Rasional pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Downs dalam karyanya *An Economic Theory of Democracy* (1957) dan dikembangkan antara lain oleh Olson dalam *The Logic of Collective Action* (1965). Model pilihan rasional percaya bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan evaluasi subjektif terhadap berbagai kondisi (ekonomipolitik- sosial) di tingkat individu maupun masyarakat. Biasanya berlaku prinsip penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terutama terhadap kandidat petahana (*incumbent*). Jika keadaan ekonomi dan sosial dianggap baik, maka pemilih cenderung memberikan penghargaan dengan memilih kembali kandidat atau partai yang berkuasa. Sebaliknya jika keadaan ekonomi dan sosial dinilai tidak baik, maka pemilih akan menghukum kandidat atau partai yang berkuasa dengan

cara memberikan suaranya kepada kandidat atau partai lain.

Evaluasi subjektif pemilih tersebut dapat berlaku secara egosentrik (dari perspektif yang dialami langsung oleh pemilih) maupun secara sosiotropik (penilaian terhadap kondisi makro secara regional maupun nasional). Model pilihan rasional percaya bahwa faktor-faktor ekonomi memiliki peranan yang menentukan terhadap perilaku memilih seseorang. Karena itu model ini sering juga disebut model *economic voting* (Dorussen, Han 2002).

Menurut Evans, pemilih cenderung memilih partai dan calon atas dasar manfaat yang didapat atau dijanjikan (Evans, Jocelyn A J. 2004). Manfaat yang diharapkan dari pemberian suara akan bervariasi tergantung latar belakang pemilih. Namun, beberapa diantara faktor yang memotivasi pemilih dapat berupa: manfaat bagi kelompok (misalnya kebijakan tertentu bagi kelas pekerja); keuntungan materi (misalnya penurunan pajak); kompetensi manajerial (misalnya peningkatan kualitas pelayanan publik); fokus pada isu-isu yang relevan (misalnya kebijakan lingkungan untuk mengurangi polusi); dan kekalahan pihak lain (misalnya memilih partai konservatif untuk menahan partai sosialis yang tidak disukai pemilih).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku pemilih yang ada di Kota Jambi dari sudut pandang organisasi dan kepemudaan dapat di ambil secara garis besar perilaku masyarakat Kota Jambi dapat

dikategorikan perilaku pemilih yang rasional dan kritis.

Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bagaimana tuntutan dan harapan yang mereka inginkan dari kandidat yang nantinya akan maju pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2024. Visi misi serta program kerja yang mereka tawarkan kepada masyarakat akan menjadi faktor utama bagi masyarakat kota jambi dalam menentukan pilihan. Partai politik dalam hasil penelitian ini tidak mendapatkan andil yang besar dalam masyarakat menentukan sebuah pilihannya khususnya pemilihan calon gubernur jambi 2024.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. H. (2017). *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Aprilia, M. P. (2022), *Perilaku Memilih Generasi Muda Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020*, Eksekutif, Vol 2, No 2, 2022.
- Budiardjo, Mariam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bintar R. Siragih. (1998). *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Davidson, Donald. (2004). *Problems of Rationality*. Oxford University Press: Oxford.
- Evans, Jocelyn A J. (2004). *Voter and Voting: An Introduction*. Sage Publications. London, Thousand Oaks: New Delhi.
- Firmanzah, (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heywood, Andrew. (2007). *Politics. Third Edition*. New York: Palgrave Foundations.
- Hans Kelsen. (2010). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negar*. Bandung: Nusa Media.
- Creswell, J. (2013). *Research Design*

pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Miftah Toha. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huda, N. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta. 2011.
- Waridah, Siti. (2003). *Sejarah Nasional dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Wiratna, S. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers/.